

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar belakang

Untuk mengetahui kemajuan pendidikan yang telah dilaksanakan, terkadang diperlukan survey sudah seberapa jauh kemajuan pendidikan kita saat ini. Survey yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tentang peringkat pendidikan dunia tahun 2015 menyatakan Lima peringkat teratas dipegang oleh negara-negara Asia. OECD merupakan organisasi internasional yang menganut ekonomi pasar bebas.. Analisis yang digunakan oleh OECD berdasarkan standar global yang lebih luas menggunakan tes PISA (*Programme For International Study Assessment*). Tes PISA merupakan studi internasional tentang prestasi membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Indonesia sendiri telah ikut tes ini sejak tahun 2000. Hasil survey yang OECD lakukan ini berdasarkan pada hasil tes di 76 negara dalam hal hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yang ikut berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-69.<sup>1</sup>

Di dunia internasional, mutu pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di semua dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO *Education For All Global Monitoring Report 2012*. Sedangkan berdasarkan

---

<sup>1</sup>Sikerok.Com,2015.*Rangking Pendidikan Dunia,Indonesia ke Berapa?*(Online) ((<http://www.sikerok.com/ranking-pendidikan-dunia-tahun-2015-indonesia-ke-berapa>),Diakses Tanggal 19 Juli 2016 Pukul 20.45 WIB)

Indeks Perkembangan Pendidikan (*Education Development Index*, EDI), Indonesia berada kepada peringkat ke-69 dari 127 negara terhadap 2011.<sup>2</sup>

Untuk saat ini, Nilai rerata Ujian Nasional (UN) 2016 tingkat SMA/SMK sederajat mengalami penurunan yang signifikan. Hasil rerata UN SMA/SMK secara keseluruhan pada tahun 2016 ini adalah 55,03, dibandingkan tahun 2015 lalu yakni 61,93. Penurunan nilai rerata UN SMA/SMK 2016 tersebut merupakan kondisi nyata capaian nilai siswa di lapangan. Hal ini tidak dibantah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan karena penurunan nilai rerata UN SMA/SMK tersebut, berbanding terbalik dengan Indeks Integritas UN (IIUN) yang mengalami peningkatan. "Ada perubahan yang terlihat pada UN kali ini yakni angka nilai UN ada penurunan. Sementara IIUN mengalami peningkatan. Fakta ini menunjukkan bahwa penurunan ini terjadi karena selama bertahun-tahun lalu terjadi ketidakjujuran yang masif di sekolah-sekolah kita," ujarnya dalam konferensi pers Hasil Ujian Nasional tingkat SMA/SMK 2016 di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin, 9 Mei 2016. Berdasarkan data Kemendikbud, nilai IIUN mengalami peningkatan 2,06 angka. Yakni dari 61,98 pada tahun 2015 lalu, menjadi 64,04 di tahun 2016 ini.<sup>3</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada kondisi pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu yang menjadi faktor masih rendahnya mutu pendidikan di

---

<sup>2</sup>Pendidikan indonesia.com.2015.*Potret Dunia Pendidikan Indonesia* (online) (<http://www.pendidikanindonesia.com/2015/01/potret-dunia-pendidikan-di-indonesia.html>), Diakses Tanggal 19 Juli 2016 Pukul 20.45 WIB

<sup>3</sup>Pikiran rakyat.com. 2016. *Nilai Rerata UN SMA 2016 Turun, Kejujuran Bertambah*. (online) (<http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/05/09/nilai-rerata-un-sma-2016-turun-kejujuran-bertambah-368657>), Diakses Tanggal 19 Juli 2016 Pukul 20.45 WIB

Provinsi Sumatera Barat adalah karena masih banyaknya guru-guru khususnya SMA di Provinsi Sumatera barat yang masih belum memenuhi standar dalam mengajar. Hal ini terlihat dari tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Guru menurut kelayakan mengajar Provinsi Sumatera Barat**

No	Variabel	SD	SMP	SMA	Dikdas/Dikmen
1	Layak	44.416	20.764	12.689	77.869
2	Tidak Layak	8.517	2.230	3.033	13.780
	Jumlah	52.933	22.994	15.722	91.649
1	%Layak	83,91	90,30	80,71	84,96
2	%Tidak Layak	16,09	9,70	19,29	15,04

Sumber: Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Sumbar tahun 2014/2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA tingkat kelayakan mengajar guru yang paling rendah adalah pada tingkat SMA yaitu sebesar 80,71%. Dari hal tersebut berarti 19,29% (3,033 orang) dari jumlah guru SMA di Sumatera barat dapat dikatakan belum memenuhi standar dalam mengajar.

Masih banyaknya guru-guru yang belum memenuhi standar mengajar juga dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“Peringkat lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah belum masuk 10 besar ke tingkat nasional, bahkan regional pun belum seperti yang dicita-citakan,...., Beberapa usaha yang harus segera dilakukan antara lain peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,

penyempurnaan kurikulum dan meningkatkan kualifikasi guru atau pendidik lainnya”:<sup>4</sup>

Dari LAKIP tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari peningkatan kualifikasi tenaga pendidik yang ada sehingga tenaga pendidik tidak hanya memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas tapi juga membangun motivasi dan semangat belajar bagi siswa.

Tenaga pendidik tersebut disatukan dalam satu forum yaitu forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). MGMP merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah.<sup>5</sup> Forum MGMP merupakan pijakan yang efektif sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan guru sebagai tenaga pendidik.

Untuk meningkatkan kualitas guru SMA di Sumatera Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengadakan program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK Sumatera Barat. Adapun tujuan umum Dinas terhadap program pemberdayaan MGMP adalah menumbuh kembangkan kegiatan forum MGMP SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan mutu pembelajaran yang sesuai

<sup>4</sup>Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014 Hal. 6

<sup>5</sup> Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG MGMP. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2009. Hal. iv



dengan standar pelayanan pendidikan dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional.<sup>6</sup>

Suatu program memerlukan perencanaan yang matang. Untuk itu Dinas merencanakan program melalui mekanisme-mekanisme tertentu, dalam hal program pemberdayaan MGMP, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, langkah-langkah perencanaannya yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai harus diketahui dan ditetapkan dalam hal ini memperbaiki mutu pendidikan di Sumatera Barat.
2. Mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan.
3. Dilakukan analisa data dan informasi tersebut untuk menemukan permasalahan yang terjadi.
4. Pembuatan beberapa rencana program.
5. Melaksanakan Workshop.

(Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nasmeri, M.Pd., pada tanggal 30 Juni 2016 Pukul 11.15 am)

Program pemberdayaan MGMP perlu dikembangkan karena menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat permasalahan peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat diperbaiki melalui pengembangan pembelajaran kepada guru-guru. Pengembangan pembelajaran ini berupa desain pembelajaran yang ada di SMA (Sekolah Menengah Atas) dan

<sup>6</sup>Term Of Reference (TOR) Workshop Pemberdayaan Forum MGMP Dan MKKS SMA/SMK Tingkat Provinsi Sumatra Barat, Program Dan Kegiatan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2015

peningkatan penguasaan materi oleh guru sehingga mendukung pengembangan model pembelajaran yang efektif untuk siswa.

Untuk tercapainya pelaksanaan suatu program, dalam perencanaan dibutuhkan tatacara penyusunan program. Dalam penyusunan program pemberdayaan MGMP, Dinas sebagai pelaksana kegiatan, melakukan beberapa kegiatan rapat, hal ini sesuai dengan wawancara dengan ketua MGMP Bahasa Inggris, mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Ketua serta sekretaris dan anggota setiap MGMP merumuskan program MGMP terkait.
2. pihak MGMP yaitu Ketua dan Sekretaris beserta anggota menyerahkan proposal kepada Dinas .
3. Dinas melakukan penilaian terhadap proposal tersebut, dan memutuskan diterima atau tidaknya program tersebut.
4. Dinas menghubungi MGMP yang proposalnya diterima.
5. Diadakan Workshop, didalam Workshop pihak MGMP melakukan presentasi terkait program yang akan mereka jalankan, kemudian pihak Dinas memberikan masukan dan arahan program-program tambahan yang sesuai menurut kebutuhan pendidikan Nasional.
6. Hasil dari Workshop ini yang kemudian menjadi program kegiatan dari masing-masing MGMP.

(Hasil wawancara dengan Ibu Seprah Madeni, M.Pd. pada tanggal, 22 Juni 2016 Pukul 08.15 am)

Sesuai dengan poin ke lima diatas, setiap MGMP diberikan kewenangan untuk menyusun agenda dan kegiatan tahunan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah di rencanakan oleh Dinas.

Program pemberdayaan MGMP SMA/SMK merupakan salah satu dari program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini adalah program kerja peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan oleh seksi pendidik dan tenaga kependidikan (tendik) bidang pendidikan menengah (dikmen) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 :

**Tabel. 1.2**  
Kegiatan Tendik Dikmen Tahun 2016  
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan  
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Sumatera Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Dana
1	Lomba Olimpiade Sains Guru SMA, SMK, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional untuk Mata Pelajaran Sains	Padang/Jakarta	Terpilihnya peringkat 1 olimpiade sains guru SMA/SMK yang akan mewakili Sumbar di tingkat Nasional	125.000.000
2	Pemberdayaan MGMP SMA/SMK dan MKKS Sumatera Barat	Kab/Kota Sumbar	Terlaksananya pemberian bantuan, peningkatan kompetensi guru, MGMP (PKG-MGMP) SMA/SMK dan MKKS se Sumbar	412.930.000
3	Seleksi dan Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Tingkat SMA, SMK, Pegawai dan Paket C ke Tingkat Nasional	Padang	Terpilih dan dibekalinya guru, kepek berprestasi tingkat SMA/MA/SMK, pengawas tutor Paket C berdedikasi untuk lomba tingkat nasional.	548.987.000

4	Sertifikasi Asesor Guru SMK se-Sumatera Barat	Padang	Tersedianya tenaga asesor SMK di Sumbar	297.725.000
5	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMA dan SMK Tingkat Provinsi	Padang	Meningkatnya kompetensi guru SMA/SMK dalam PTK	600.000.000
6	Pemberdayaan pengawas Sekolah SMA dan SMK dalam Supervisi Manajerial Akademik Sekolah Tingkat Provinsi	Padang	Meningkatnya kompetensi pengawas SMA/SMK di Sumbar	120.000.000
7	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru SMA/SMK Tingkat Provinsi	Padang	Meningkatnya kompetensi guru SMA/SMK di Sumbar	250.000.000
8	Pemberian Penghargaan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi SMA/SMK	Padang	Termotivasinya guru, kepek, pengawas dan tutor Paket C untuk meningkatkan prestasi	115.000.000
9	Biaya pengelolaan pendidikan di SMAN 2 Sumatera Barat	Padang	Meningkatnya proses belajar mengajar di SMAN 2 Sumbar	1.600.000.000

Dalam program-program yang menjadi *action plan* atau kegiatan di satker tendik bidang dikmen, salah satu Permasalahan yang menjadi topik peneliti adalah pada program Pemberdayaan MGMP SMA/SMK dan MKKS Sumatera Barat. Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan untuk MGMP.

Adapun tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program pemberdayaan MGMP adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Meningkatkan aktivitas guru di forum MGMP Kab/Kota
2. Meningkatkan aktivitas kepala sekolah di forum MKKS
3. Memberdayakan guru pemandu MGMP sesuai dengan bidang studi

<sup>7</sup> Ibid.



4. Memetakan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru sehari-hari
5. Memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi, melalui saling berbagi pengalaman dan belajar dari contoh-contoh dan praktik yang baik (best practices)
6. Meningkatkan kompetensi guru sebagai fasilitator MGMP SMA tingkat provinsi Sumatera Barat. Sehingga pada setiap pertemuan MGMP dapat meningkatkan kompetensi guru dalam merancang program kegiatan MGMP yang efektif dan efisien, menyusun kegiatan pembelajaran yang mencakup penguasaan materi pelajaran, memahami tentang cara belajar siswa dan keterampilan mengevaluasi dan merefleksikan diri.

Selanjutnya, Program-program yang dilakukan Dinas dalam menyelenggarakan program pemberdayaan MGMP SMA/SMK dilakukan dalam dua tahapan :

1. Melakukan workshop /pelatihan dan pembekalan untuk pengurus MGMP dan sekretaris MGMP yang di SK kan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
2. Pelaksanaan Bimtek yang dilakukan di kabupaten kota diutamakan untuk nilai UN yang rendah

Program pemberdayaan MGMP dilaksanakan setiap tahunnya kepada SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat dimana untuk tahun 2016 dilaksanakan pada 9 forum MGMP. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan pemberian bantuan dana operasional dan motivasi kepada 9 MGMP yang ada. mata

pelajaran yang diberdayakan dari 9 MGMP dipilih oleh Dinas adalah mata pelajaran inti atau yang diUN-kan dan bagi yang belum mendapatkan dana untuk program pemberdayaan MGMP dengan tujuan pemerataan kompetensi guru bagi setiap mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat:

“...Karena keterbatasan dana, sebelumnya kami mengajukan 18 MGMP namun yang disetujui oleh DPR bagian komisi V hanya 9 MGMP, kemudian kamilah yang menetapkan MGMP mana yang dipilih untuk diberdayakan”. (Hasil wawancara dengan Drs. Nasmeri, M.Pd., pada tanggal, 23 Juni 2016 Pukul 08.15 am)

Adapun mata pelajaran yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
Forum MGMP SMA/SMK di Sumatera Barat

No	Mata pelajaran	No	Mata Pelajaran
1	Matematika	6	Kejuruan Bisnis Manajemen
2	Bahasa Indonesia	7	RPKn
3	Bahasa Inggris	8	Teknik Elektro
4	Kimia	9	Teknik Listrik
5	Fisika		

Sumber: Term Of Reference (TOR) Workshop Pemberdayaan Forum MGMP SMA/SMK Tingkat Provinsi Sumatra Barat

Tenaga pendidik dianggap mempunyai peran yang paling besar dalam membentuk siswa yang berkualitas dan bermutu. Selain itu dengan adanya pembaharuan kurikulum maka tenaga pendidik diharapkan memiliki wawasan ilmu yang lebih dan pola mengajar yang efektif karena mengingat agar tingginya motivasi belajar pada siswa.

Dalam pelaksanaan program masing-masing MGMP nantinya memiliki jumlah kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan agar tujuan program pemberdayaan tercapai. Hal ini dinyatakan dalam wawancara dengan Ketua MGMP Bahasa Inggris:

“..Ya, kita diberikan kewenangan penuh, bagaimana implementasi kegiatannya, siapa narasumbernya, pihakDinas hanya sebagai fasilitator yang menyediakan dana..”  
(Hasil wawancara dengan Seprah Madeni, M.Pd pada tanggal, 22 Juni 2016 Pukul 08.15 am)

Kegiatan-kegiatan MGMP Provinsi Sumatera Barat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Kegiatan MGMP SMA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015**

No	MGMP	Jumlah Kegiatan	Kegiatan
1	Matematika	5	1) Evaluasi Diri Guru 2) Analisis Hasil Belajar dan PTK 3) Sosialisasi UKG 4) Persiapan UKG 5) Persiapan UKG
2	Bahasa Inggris	8	1) Workshop “ tentang penyempurnaan perangkat pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum 2013 & 2006 semester II” 2) Workshop “ penelitian tindakan kelas (PTK) & best practice untuk peningkatan keprofesian berkelanjutan

			(PKB) serta penerapan model-model pembelajaran” 3) Workshop “ penelitian tindakan kelas (PTK) & best practice untuk peningkatan keprofesian berkelanjutan (PKB) 4) Workshop pembuatan tentang bahan ajar berbasis IT 5) Workshop tentang sosialisasi UKG & PKG 2015 6) Workshop bedah kisi-kisi UKG 2015 7) Analisis kisi-kisi UKG & prediksi soal-soal UKG 8) Workshop pembuatan karya inovatif guru untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)
3	Bahasa Indonesia	4	1) Pemantapan pembuatan LKS kelas X semester anjil kurikulum 2013 dan KTSP 2) Model, Revisi Kurikulum 13, dan Bedah SKL UN TP 2014/2015 3) Workshop UKG dan Penilaian 4) Persiapan Pelaksanaan UKG
4	Fisika	4	1) Pertemuan Dengan Pengurus HFI Sumbar 2) Bimtek Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015 3) Bimbingan Penyusunan Artikel Ilmiah 4) Bimbingan Penyusunan Jurnal Ilmiah Untuk Seminar Nasional Fisika PPS UNP

*Sumber: laporan kegiatan 4 MGMP tahun 2015*

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan MGMP, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan pertama terletak pada perencanaan anggaran. Perencanaan kurang terarah karena dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Dinas pendidikan, yang dialokasikan untuk kegiatan Program Pemberdayaan MGMP relatif sedikit. Awalnya program ini diperuntukkan untuk 16 MGMP yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sekarang karena anggaran ditahun 2016 telah dikurangi oleh Pemerintah (DPR) maka saat ini MGMP yang diberdayakan sebanyak 9 MGMP. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah, dalam wawancara sebagai berikut:

“ditahun kemarin MGMP yang diberdayakan 16. Sekarang MGMP yang diberdayakan



tinggal 9 MGMP saja. Hal ini dikarenakan pengurangan jumlah anggaran yang diterima Dinas untuk pelaksanaan program ini.”  
(Hasil wawancara dengan Dra. Helmiza, M.Pd., pada tanggal 1 juli 2016 pukul 10.15 am)

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu ketua forum MGMP Bahasa Inggris, dalam wawancara sebagai berikut:

“MGMP yang ikut dalam program Dinas sekarang hanya tinggal 9 MGMP saja. Ini karena dana kita dikurangi sehingga banyak MGMP berhenti bergerak karena kekurangan dana. Jadi yang masih bergerak sekarang ini banyak memakai dana pribadi sebagai tambahan dalam melakukan kegiatan jika dana dari Dinas kurang mencukupi.”  
(Hasil wawancara dengan ibu Seprah Madeni, M.Pd. pada tanggal, 22 Juni 2016 Pukul 08.25 am)

Dari wawancara diatas dapat terlihat bahwa memang terjadi pengurangan perencanaan anggaran dari Dinas sehingga menyebabkan tidak tercapainya sasaran program yang terbukti dari berkurangnya jumlah Forum MGMP yang diberdayakan.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait sarana dan prasarana/alat dalam melaksanakan program dimana yang ditemukan dilapangan masih kurang. Kekurangan sarana dan prasarana terletak pada ketersediaan komputer dan *notebook*. Keterbatasan jumlah *notebook* menyebabkan hanya beberapa guru saja yang berperan aktif dalam forum. Hal ini dijelaskan oleh salah satu ketua FMGMP Bahasa Inggris, dalam wawancara sebagai berikut:

“.....sarana yang kurang itu yang paling penting adalah *notebook* karena itu merupakan alat yang digunakan oleh peserta untuk dapat terlibat langsung dalam kegiatan seperti langsung mempraktekkan apa yang diajarkan.....”(Hasil wawancara dengan ibu Seprah Madeni,M.Pd.,pada tanggal, 22 Juni 2016 Pukul 08.15 am)

Selain itu Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah, ibu Helmiza menjelaskan terkait dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

“.....bukan hanya keterbatasan *notebook* tapi juga banyak guru yang kurang mahir menggunakan *notebook* sehingga tidak dapat langsung memahami dan mempraktekkan apa yang diberikan kepada mereka.....”(Hasil wawancara dengan Dra. Helmiza,M.Pd., pada tanggal 1 juli 2016 pukul 10.15 am)

Dari wawancara diatas terlihat keterbatasan tidak hanya masalah kurangnya sarana dan prasarana tetapi juga kemampuan guru dalam menggunakannya. Kekurangan ini berdampak pada kurang aktifnya peserta forum yang lain sehingga nantinya penyampaian dan penerapan ilmu yang diberikan tidak berjalan efektif.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pengawasan dan perhatian Dinas terhadap jalannya program ini. Hal ini terlihat dari tidak ada intruksi atau arahan langsung dari Dinas, hanya ada kebijaksanaan atau pedoman-pedoman dan panduan yang telah dibuat atau direncanakan sebelum program dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ibu ketua forum MGMP:

Tidak ada instruksi atau arahan, kewenangan sepenuhnya diberikan dinas kepada kami

(MGMP) dalam menjalankan program.  
 (Hasil wawancara dengan ibu Seprah  
 Madeni, M.Pd., pada tanggal, 21 Juli 2016  
 Pukul 11.15 am)

Dari wawancara diatas dapat terlihat bahwa kurangnya pengawasan dalam bentuk arahan langsung dari pimpinan Dinas sebagai penanggung jawab kegiatan sehingga Forum MGMP bergerak berdasarkan pada pedoman/panduan yang ada.

Sesuai dengan Tupoksi dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berbagai permasalahan yang ada didalam pelaksanaan program maka peneliti menemukan bahwa terdapat kekurangan dari Dinas dalam mengelola (manajemen) program pemberdayaan MGMP. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu administrasi negara pada kosentrasi manajemen, terutama pada fungsi Manajemen Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam menyelesaikan masalah, khususnya pada bidang Pendidikan Menengah di Dinas Provinsi Sumatera Barat.